

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) TERHADAP PEMBERDAYAAN KOPERASI

(Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang)

Ainun Nahib¹, Nurul Umi Ati², Khoiron³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail : ainunnahib100@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang Baik (good governance) terhadap pemberdayaan koperasi, dalam proses peran pemerintah daerah terhadap pemberdayaan koperasi aka nada faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi aktifitas peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Rembang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis pendekatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulannya dengan melakukan (Observasi, Wawancara, Dokumentasi). Sumber data didapat dari segi primer dan sekunder. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dari miles dan Huberman dalam saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi di Kabupaten Rembang masih banyak Koperasi yang tidak aktif, dikarenakan faktor internal yang dialami oleh banyak Koperasi di Kabupaten Rembang, dari segi permodalan hingga tidak bisa mengembangkan badan usaha, dan masih buruk dalam segi manajerial. Pemerintah Daerah berperan penting terhadap masa depan Koperasi, pendekatan intensif dan pelayanan fasilitas terhadap Koperasi di Kabupaten Rembang harus ditingkatkan guna menciptakan Koperasi dan berdaulat dan berkembang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian

Kata Kunci : Pemberdayaan, pengembangan, tata kelola pemerintahan baik.

Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintah di bidang koperasi, dan UMKM, daerah Kabupaten mempunyai kewenangan melakukan pendidikan, Perkoperasian, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi. Pemerintah memiliki kewajiban di dalam mengembangkan dan mendorong pertumbuhan koperasi di suatu daerah, koperasi memiliki peranan penting di dalam pengembangan usaha yang di lakukan pemerintah di dalam mengelola aset daerah yang ada. Pemerintah daerah sendiri memberikan suatu pendidikan, kemudahan, serta perlindungan kepada koperasi.

Di situasi seperti ini Pemerintah Daerah harus pandai melakukan suatu kebijakan di dalam mempertahankan eksistensi koperasi yang ada di lingkup daerah, karena dengan adanya koperasi bisa membantu mengembangkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat dan juga daerah bisa memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintah harus tegas untuk melakukan keputusan di dalam pengelolaan aset daerah salah satunya adalah pemerintah harus mempercayakan kepada koperasi

untuk berperan di dalam memberdayakan aset daerah. Usaha-usaha koperasi yang berkembang dan masih aktif dengan baik ini harus di fasilitasi oleh pemerintah daerah agar bisa tetap eksis dan tidak mati di dalam pengelolaan Usaha yang di kembangkan koperasi itu sendiri.

Apa yang sudah bisa di kembangkan oleh koperasi pemerintah harus bisa tegas melakukan keputusan bahwa jangan sampai ada badan usaha lain yang ikut andil dalam mengelola aset daerah tersebut, karena itu berpotensi bisa mengancam suatu perkembangan koperasi itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk memperhatikan perekonomian masyarakat dan daerah bahkan nasional, disini pemerintah berperan penting dalam mengembangkan koperasi dan ini menjadi salah satu tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk berusaha mempertahankan eksistensi koperasi.

Berdasarkan sumber dari Koran Online Berita Merdeka Online.com pada 1 Januari 2020 yang menerangkan bahwa “tiga kali berturut-turut tak menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sekitar 50 persen dari jumlah keseluruhan sekitar 500 Koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang terancam dibubarkan”.

Kabupaten Rembang masih banyak permasalahan mengenai koperasi, sehingga pemerintah dalam melakukan pengelolaan yang baik pemerintah melakukan kebijakan mengurangi koperasi yang tidak melakukan RAT dan fungsinya dengan baik untuk menumbuhkan perekonomian yang baik, mensejahterahkan masyarakat, dan menciptakan suatu kedaulatan. Adapun strategi pemerintah daerah untuk koperasi tersebut adalah Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dengan baik, pengawasan dan pengendalian itu salah satu strategi pemerintah dalam pemberdayaan koperasi di dalam mengembangkan suatu usaha koperasi tersebut, karena strategi-strategi yang efektiflah yang akan mengantarkan pemerintah menuju tata kelola yang baik, ketika tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik maka bisa dikatakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Itulah suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka diangkatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi?

Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menemukan sebuah solusi dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini dijelaskan secara spesifik sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Idrus (2009:101) menjelaskan bahwa jenis deskriptif karena data yang disajikan berupa narasi cerita, penuturan informasi, dokumen-dokumen pribadi seperti foro, catatan pribadi/diary (buku harian), dan

banyak hal lain yang tidak didominasi angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Pendekatan kualitatif sebagai model yang dikembangkan oleh Mahzab Baden. Secara sederhana penelitian kualitatif adalah meneliti informasi sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Penelitian kualitatif berlangsung dalam situasi alamiah (*natural setting*).

Sedangkan Menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan manfaat berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata apa yang terjadi dilapangan secara menyeluruh, kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Pemberdayaan Koperasi (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang).

Fokus Penelitian

Menurut Moloeng (2000) mengemukakan bahwa fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimana gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi.
 - a. Koperasi yang tidak aktif.
 - b. Strategi pemberdayaan koperasi.
 - c. Pelaksanaan strategi pemberdayaan koperasi.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi.
 - a. Faktor Pendukung
 1. Aspek sumber daya manusia yang baik.
 2. Faktor Kelembagaan yang terstruktur.
 3. Aspek pendanaan yang cukup baik.

4. Badan usaha Koperasi yang cukup baik.
- b. Faktor Penghambat
 1. Adanya Koperasi yang tidak aktif.
 2. Banyak Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
 3. Banyak Koperasi yang tidak menjalankan RAT (Rapat Anggaran Tahunan).

Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sumber yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang. Data Primer ini dapat disebut juga sebagai subyek dan informasi penelitian. Dalam penelitian ini dipilih pihak terkait yaitu pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Rembang yaitu Ibu Idha Selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang, Ibu Septina Sebagai Kasi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi, Bapak Tafrikhan Sebagai Pengelola Kelembagaan Koperasi, dan Bapak Mulyono sebagai Manajer KUD Misoyo Mardi Mino Kecamatan Sarang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang secara tidak langsung melalui media pertama atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan. Data tersebut dapat diperoleh melalui tulisan, tabel, gambar, dokumen dan simbol-simbol lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah sebagai berikut : 1) Wawancara, 2) Observasi, 3) Dokumentasi.

Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data
Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

dianalisis kemudian dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan catatan dokumentasi diberi kode untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

Pembahasan

Gambaran atau pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terhadap pemberdayaan koperasi?

Pemerintah Daerah memiliki suatu peran yang sangat besar di dalam perkembangan suatu perekonomian masyarakat, perkembangan perekonomian bisa di ciptakan berdasarkan peran pemerintah yang efektif di dalam pengembangan roda perekonomian masyarakat, salah satunya melalui peningkatan dan pengembangan koperasi untuk menjadi penggerak perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang Ibu Idha, beliau mengatakan :

“...Peran Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan dan mewujudkan Koperasi yang menjadi penggerak perekonomian Daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat”.

Dapat diketahui gambaran pelaksanaan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan koperasi dapat dilihat dari suatu peran Pemerintah Daerah yang memberikan peran terhadap perkembangan koperasi melalui aspek permodalan dan pemasaran produk, meningkatkan mutu produksi melalui pelatihan dan rapat koordinasi, menumbuhkan kemandirian, disiplin dan semangat kerja untuk peningkatan finansial, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas untuk peningkatan koperasi yang ada. Seperti yang di tuturkan Ibu Idha selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang mengatakan:

“...Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Koperasi adalah Akses terbuka untuk mendapatkan modal usaha dan memasarkan produk, peningkatan mutu produksi melalui kegiatan pelatihan atau rapat koordinasi (5 kali pelatihan) (20 kali koordinasi), menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan semangat kerjasama untuk peningkatan finansial bagi seluruh anggota koperasi 90% ksp sehat”. (Wawancara, 18 Januari 2021).

Permasalahan di Kabupaten Rembang yang masih banyak Koperasi yang tidak aktif menjadi indikator pertama hambatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Koperasi di Kabupaten Rembang. Ketidakaktifan koperasi disebabkan karena masih banyak Koperasi yang tidak melaporkan kegiatannya, dan masih banyak Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya sebagai Koperasi dengan baik. Seperti yang di tuturkan salah satu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang, Ibu Idha, beliau mengatakan bahwa:

“...Di Kabupaten Rembang masih banyak Koperasi yang tidak aktif, Koperasi yang dinyatakan sudah tidak aktif karena sudah tidak melaporkan kegiatannya, dan Koperasi yang sudah tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai Koperasi”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Pemerintah Daerah memiliki setrategi di dalam pemberdayaan Koperasi, tujuan dari setrategi tersebut di harapkan agar Koperasi di Kabupaten Rembang ini bisa selalu eksis dan aktif di dalam bidang perkoperasian, Setrategi Pemerintah Daerah yang di tekankan untuk memberdayakan Koperasi yaitu pembiayaan untuk Koperasi tujuannya agar Koperasi bisa mengembangkan berbagai kepentingan Koperasi, Iklim bisnis, Teknologi untuk mempercepat dan mempermudah Koperasi, Kemampuan Manajerial, dan Akses Pasar, seperti halnya yang dipaparkan oleh salah satu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang, Ibu Idha, beliau mengatakan bahwa:

“...Setrategi yang di lakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Rembang ini yaitu Pembiayaan, Iklim Bisnis, Teknologi, Kemampuan Manajerial, dan Akses Pasar, itu semua untuk menciptakan dan mempertahankan Koperasi di Kabupaten Rembang agar selalu eksis dan aktif di dalam menjalankan Koperasi”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Dalam pelaksanaan setrategi Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan koperasi ada beberapa terobosan setrategi yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Koperasi, adapun pelaksanaan setrategi yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah (Pembiayaan) seperti memberikan suatu akses

pelayanan pembiayaan terhadap seluruh Koperasi, (Iklim Bisnis) bisa dikatakan pengaruh birokrasi khususnya untuk Koperasi misalnya penggunaan IT untuk mengakses birokrasi, (Teknologi) pengenalan teknologi bagi Koperasi, (Kemampuan Manajerial) training bagi anggota atau karyawan Koperasi, dan yang terakhir (Akses Pasar) mendukung perkembangan akses ke pasar internasional. Penjelasan di atas seperti yang di tuturkan oleh Ibu Idha, beliau sebagai Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinindagkopukm Kabupaten Rembang mengatakan bahwa:

“...Pelaksanaan setrategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi seperti (Pembiayaan) memberikan akses layanan pembiayaan, (Iklim Bisnis) pengurangan birokrasi khususnya untuk Koperasi misalnya melalui penggunaan IT untuk memangkas birokrasi, (Teknologi) pengenalan teknologi bagi Koperasi (Quality control, inovasi, perubahan teknis dan organisasi, dsb), (Kemampuan Manajerial) training bagi anggota dan karyawan Koperasi memberikan akses jasa pendampingan dan konsultasi, (Akses Pasar) membantu akses ke pasar internasional membantu akses Koperasi untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) terhadap Pemberdayaan Koperasi

Faktor pendukung dalam pemberdayaan Koperasi bisa dikatakan salah satu aspek yang membantu berhasilnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran didalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi khususnya di Kabupaten Rembang, karena faktor pendukung adalah salah satu hal yang mendorong keberhasilan program-program yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik. Seperti yang dituturkan Kasi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi Kabupaten Rembang, Ibu Septina, beliau memaparkan bahwa:

“...Faktor yang menjadi pendukung dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Koperasi adalah adanya struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas, adanya komunikasi yang intens dengan penggerak Koperasi di grup whatsapp, adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi, adanya hubungan yang baik dengan stakeholders lain seperti Dinas Provinsi, Kementerian dan Lembaga Keuangan lain”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Dalam faktor pendukung memiliki banyak sisi baik dari sumber daya manusia yang baik, kelembagaan yang terstruktur dan lain sebagainya, salah satu yang harus di perhatikan oleh Pemerintah

Daerah dalam konteks internal Koperasi adalah sumber daya manusianya (SDM), ini harus selalu di perhatikan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan sumber daya manusia, karena sangat berpengaruh sangat besar dalam perjalanan Koperasi, Koperasi bisa dikatakan bergantung pada sumber daya manusia karena ketika sumber daya manusia sudah tidak eksis lagi maka Koperasi juga akan mengikutinya, jadi Peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk menjaga sumber daya manusia di sector Koperasi berdasarkan program-program atau trobosan yang diberikan Pemerintah Daerah. Ibu Septina, sebagai Kasi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi Kabupaten Rembang. Menuturkan bahwa:

“...Sumber daya manusia salah satu aspek terpenting di dalam perjalanan Koperasi jadi harus selalu didorong untuk tetap berkembang untuk mampu mensejahterahkan anggotanya dan Koperasi itu sendiri”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Faktor penghambat dari Peran Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan Koperasi menjadikan salah satu acuan untuk Pemerintah Daerah agar bisa mendapatkan suatu pandangan untuk mengevaluasi kebijakan dan menciptakan kesejahteraan bagi Koperasi baik dalam aspek apapun, sehingga Koperasi yang memiliki permasalahan atau suatu hambatan didalam menjalankan badan usaha Koperasi atau semua aspek Koperasi harus di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dibantu untuk mengembangkan suatu potensi yang dimiliki Koperasi melalui Program-Program atau Kebijakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Koperasi agar tercipta Koperasi yang berdaya saing tinggi dan berguna bagi masyarakat, Daerah, bahkan Negara.

Peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan problem di Koperasi menjadi salah satu tugas yang harus segera di slesaikan oleh Pemerintah Daerah. Hambatan-hambatan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Koperasi harus di hilangkan dengan menerapkan program-program yang sesuai. Seperti yang di paparkan oleh Bapak Taftikhan, sebagai Pengelola Kelembagaan Koperasi Kabupaten Rembang, beliau mengatakan:

“...Faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Koperasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan permodalan bagi Koperasi, dan permasalahan teknis Koperasi, ini harus segera di slesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui program-program yang di buat”. (Wawancara, 18 Januari 2021)

Ada beberapa Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini adalah salah satu Koperasi yang dikatakan sudah tidak aktif lagi, dan bisa dilakukan pembubaran karena sudah tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan fungsinya sebagai Koperasi.

Tetapi Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik juga harus mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah agar lebih baik lagi dan tetap bisa menjalankan Koperasi sesuai dengan fungsinya sebagai Koperasi, seperti yang di sampaikan oleh salah satu Pengelola Kelembagaan Koperasi Kabupaten Rembang, bapak Taftikhan, beliau menyampaikan bahwa:

“...Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik didampingi agar bisa berfungsi kembali dengan penataan organisasi, kelembagaan dan badan usahanya”. (Wawancara 18 Januari 2021)

Kesimpulan

Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah memiliki upaya-upaya di dalam Pemberdayaan Koperasi mengaktifkan kembali Koperasi yang ada di Kabupaten Rembang untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan memperbaiki perekonomian masyarakat. Koperasi tidak aktif disebabkan karena Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas Koperasi, dan tidak mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi seperti itu akan dibubarkan karena sudah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya sebagai Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Rembang.

Upaya untuk mengaktifkan kembali Koperasi yang ada di Kabupaten Rembang, Upaya Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan perhatian bagi semua Koperasi dalam bentuk pelayanan Pembiayaan, Iklim Bisnis, Teknologi, Kemampuan Manajerial, dan Akses Pasar. Upaya pelaksanaan strategi sendiri bertujuan untuk memberikan akses layanan pembiayaan, pengurangan birokrasi untuk Koperasi seperti melalui IT, Pengenalan Teknologi bagi Koperasi, memberikan suatu pelatihan dan pendidikan bagi anggota dan karyawan Koperasi dan memberikan jasa pendampingan dan konsultasi bagi Koperasi, dan yang terakhir membantu akses pasar menuju ke pasar Internasional.

Tetapi semua upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah tersebut tidak semua bisa tepat sasaran akan ada suatu hambatan dalam menjalankan upaya Pemberdayaan Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Rembang, karena masih banyak Koperasi di Kabupaten Rembang yang tidak aktif lagi, itu menjadi salah satu kendala upaya Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menerapkan Upaya Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Rembang. Faktor yang berpengaruh besar didalam pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Pemberdayaan Koperasi adalah faktor

pendukung, didalam faktor pendukung memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Terhadap Pemberdayaan Koperasi. Faktor pendukung yang terdiri dari; Aspek sumber daya yang baik, faktor kelembagaan yang terstruktur, aspek pendanaan yang baik, dan badan usaha Koperasi yang baik.

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan Koperasi adalah faktor penghambat, faktor penghambat yang menghambat pelaksanaan program Pemerintah Daerah terhadap semua Koperasi di Kabupaten Rembang masih adanya koperasi yang tidak aktif, masih adanya Koperasi yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dan juga masih ada Koperasi yang tidak melakukan dan mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ini menjadi salah satu hambatan bagi Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Rembang.

Daftar Pustaka

- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga
- Amirin, Tatang, M, 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Miles, M.B Huberman, A.M dan Saldana, J 2014 *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook, edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi
- UU No. 23 tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah dalam hal pembagian urusan pemerintah di bidang koperasi, dan UMKM, daerah Kabupaten mempunyai kewenangan melakukan pendidikan, Perkoperasian, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi*

